



PIMPINAN DPRD KOTA YOGYAKARTA Jamin Kepentingan Masyarakat, Rumuskan Politik Anggaran di Tengah Efisiensi



YOGYA (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan pemenuhan hak-hak dasar warga di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Langkah konkret ini diambil demi memastikan kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan daerah.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, menilai kondisi ekonomi pascapandemi saat ini masih sangat dipengaruhi oleh turbulensi ekonomi global. Selain itu, kebijakan efisiensi fiskal di tingkat nasional turut memberikan dampak yang signifikan terhadap ruang gerak keuangan di daerah.

Menurut Wisnu, situasi pelik tersebut mendorong perlunya pembahasan yang mendalam mengenai alternatif politik anggaran yang responsif terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus utama yang harus dikejar adalah peningkatan pendapatan rakyat secara riil sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Hal ini menjadi krusial karena pemerintah daerah ikut terdampak secara langsung terhadap dinamika keuangan nasional. Padahal, pemerintah daerah merupakan unsur tata kelola pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melihat urgensi tersebut, Wisnu pun mendorong agar lembaga legislatif di Kota Yogyakarta memiliki



Ketua DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro.

peran yang semakin progresif ke depannya. Khususnya, peningkatan peran ini harus ditunjukkan dalam menjalankan fungsi budgeting atau penganggaran daerah.

"Kepentingan masyarakat yang menjadi hak mereka harus mampu terjamin dengan baik melalui fungsi penganggaran yang dimiliki lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif," tegas Wisnu.

Oleh karena itu, pihaknya selaku pimpinan dewan memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan edukatif ini digelar pada 17-20 Juni lalu, dengan fokus membedah politik anggaran daerah di tengah arus efisiensi.

Wisnu berharap, melalui pembekalan intensif tersebut, kapasitas performa legislatif dalam merancang anggaran dapat meningkat tajam. "Harapannya, apa yang kita pelajari dapat mendukung pelaksanaan tugas DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih baik," imbuhnya.

Selama empat hari pelaksanaan Bimtek, para peserta memperoleh materi komprehensif melalui cara-mah ilmiah

dan diskusi interaktif. Mereka berhadapan langsung dengan para ekademi serta praktisi yang ahli di bidang kebijakan efisiensi dan analisis kapasi-

tas fiskal daerah. Tidak hanya teori dasar, forum tersebut juga membedah berbagai alternatif penyusunan prioritas anggaran yang adaptif terha-

dap kondisi ekonomi terkini. Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Yogyakarta diharapkan semakin memiliki pemahaman yang utuh dalam menentukan arah kebijakan fiskal.

Dengan demikian, setiap keputusan politik anggaran yang diambil ke depan akan tetap konsisten berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kemandirian fiskal Kota Yogyakarta menjadi target yang tidak bisa ditawar lagi.

Lebih jauh, kegiatan Bimtek tersebut berhasil menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman kolektif anggota dewan. Pemahaman ini penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang tetap berpihak pada rakyat, di tengah tren menurunnya kapasitas fiskal daerah.

Ketua STPMD APMD Yogyakarta Dr Sutoro Eko Yunanto MSI, sebagai narasumber utama menyampaikan bahwa pembahasan politik anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan keuangan negara semata.

"Anggaran menjadi salah satu bagian dari keuangan negara. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa uang negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Politik anggaran menjadi jembatan antara pendekatan teknokratis dan tujuan kesejahteraan masyarakat," urainya.

Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sejak awal 2025 memang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah bersama DPRD untuk

mampu menentukan prioritas pembangunan secara tepat tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi daerah saat ini tidak hanya menjaga keberlanjutan pelayanan publik yang sudah ada. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana merumuskan kebijakan fiskal yang cerdas dan mampu memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Politik anggaran adalah persoalan memilih dan memutuskan prioritas, tetapi tetap menghubungkan konsep uang negara dengan uang rakyat. Di situlah peran DPRD menjadi sangat penting untuk memastikan anggaran berbasis kinerja benar-benar mencapai tujuan kemakmuran rakyat," pungkasan Sutoro. (Dhi)



Jajaran anggota DPRD Kota Yogyakarta foto bersama di sela Bimtek terkait politik anggaran.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005